



Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia

Kevin M Sandryan A D 

Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

*Corresponding author: kevinardiman@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Revised August 7, 2024

Accepted August 9, 2024

Kata kunci:

Kebijakan Fiskal,
Pertumbuhan Ekonomi,
Vector Auto Regression
(VAR), Vector Error
Correction Model (VECM)

Keywords:

Fiscal Policy, Gross
Domestic Product, Vector
Auto Regression (VAR),
Vector Error Correction
Model (VECM)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tahun 1990 – 2022 dan menggunakan pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM). Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana pendapatan negara dan pengeluaran memengaruhi perekonomian secara langsung dengan menggunakan 3 jenis model yang dianalisis, yaitu Pendapatan Negara (Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Inflasi sebagai variabel kontrol), Pengeluaran Pemerintah (Belanja Pemerintah Pusat + Transfer Ke Daerah), dan Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal) dalam bentuk *first difference*. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, variabel pendapatan, pajak, dan belanja pemerintah memiliki dampak signifikan namun bervariasi terhadap Gdp riil. Dalam jangka panjang, variabel bersifat signifikan secara keseluruhan. Namun, pendapatan pajak berdampak negatif, sedangkan pendapatan negara bukan pajak dan inflasi berdampak positif terhadap Gdp riil. Pengeluaran pemerintah, terutama untuk belanja modal dan barang, juga meningkatkan Gdp riil, sementara belanja pegawai memiliki dampak negatif. Hasil analisis Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) menggarisbawahi pentingnya kebijakan fiskal yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

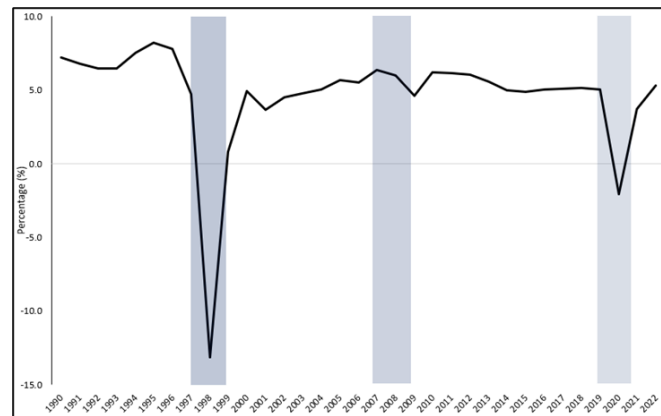
ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effects of fiscal policy on the economic growth of Indonesia. The study applies Vector Error Correction Model (VECM) methodologies, using data from 1990 to 2022. The study examines the impact of government revenue and expenditure on the economy by analyzing three types of models: Government Revenue (including Tax Revenue, Non-Tax Revenue, and Inflation as control variables), Government Expenditure (including Central Government Spending and Transfers to Regions), and Central Government Spending (including Capital Expenditure, Employee Spending, and Operational Spending) in first difference form. The analysis reveals that in the short run, variables related to revenue, tax, and government spending have a large and varying impact on real GDP. Over the long term, variables typically have a major impact, with tax revenue having a negative effect on GDP, while non-tax revenue and inflation have a positive effect on GDP. Government investment, namely on capital and operational spending, positively contributes to the growth of real GDP, whereas employee spending has a detrimental effect. The findings from the Impulse Response Function (IRF) and Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) highlight the significance of efficient fiscal policy in bolstering economic growth.



INTRODUCTION

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kemajuan suatu negara. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dalam teori, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses di mana keadaan ekonomi suatu negara mengalami perubahan positif selama jangka waktu tertentu. Peningkatan ekonomi terjadi ketika kondisi ekonomi negara tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan produksi barang dan jasa (Mankiw, 2019). Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan PDB. Menurut paham Keynesian, pertumbuhan PDB ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan neraca ekspor-impor. Keynes berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan permintaan pada keempat faktor tersebut. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y dan mengamati trennya dari waktu ke waktu, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pembangunan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998, krisis keuangan global tahun 2008-2009, serta wabah COVID-19 pada tahun 2020 telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian dalam skala internasional.



Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (%)

Berbagai strategi dan kebijakan dapat diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak, sedangkan kebijakan kontraktif menurunkan pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak. Selain itu, kebijakan fiskal di setiap negara dipengaruhi oleh keputusan presiden yang sedang menjabat pada periode itu. Hal tersebut dapat memengaruhi kebijakan fiskal yang ada karena akan selaras dengan visi misi atau proyek yang akan dibawa oleh presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya (Rosevear, n.d.,1993). Kebijakan fiskal yang dikeluarkan dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Sebagai contoh, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal kontraktif yang digunakan untuk mengatasi inflasi yang tinggi pada tahun 2013. Pada saat itu, pemerintah menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini dilakukan dalam beberapa tahap, dengan pengurangan subsidi yang signifikan terjadi pada tahun 2014 dan 2015.

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui instrumen fiskal seperti pendapatan dan pengeluaran negara. Bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, kebijakan fiskal yang dikeluarkan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi secara global. Dengan melihat adanya beberapa krisis yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti krisis ekonomi Asia (1997-1998), *Global Financial Crisis* (2008-2009), perlambatan ekonomi global (2017-2018) dan pandemi COVID-19 (2020), maka perlu adanya analisis yang lebih panjang untuk menentukan bagaimana sejauh ini

dampak dari kebijakan fiskal dari pemerintahan Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada instrumen fiskal terkait pendapatan dan pengeluaran negara, yang meliputi Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengeluaran Pemerintah, Belanja modal pemerintah pusat Pusat, Belanja pegawai pemerintah pusat Pusat, dan Belanja barang pemerintah pusat Pusat dari tahun 1990 hingga 2022.

METHODS

Pemilihan model dengan menggunakan Metode VAR dan VECM dipilih karena mampu mengaplikasikan hubungan kompleks antar variabel dalam satu sistem dan pada dinamika suatu ekonomi. Metode VAR juga memberikan pendekatan yang kuat dalam menganalisis data dan mengidentifikasi pola perubahan serta interaksi antara variabel-variabel tersebut (Enders, 2014). Metode VAR memiliki berbagai keunggulan seperti seluruh variabel dipahami sebagai endogen, model VAR bersifat fleksibel dan sederhana, di mana metode OLS dapat digunakan pada setiap persamaan dengan cara terpisah. Hasil peramalan (*forecast*) dengan VAR dalam banyak kasus lebih baik dibandingkan model struktural lainnya (Brooks, 2019).

Sedangkan untuk besaran pengaruh dan respon dan proporsi peran guncangan dari masing-masing variabel dapat dilihat dari grafik *Impulse Response Function* (IRF) dan tabel *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) dan model yang dibuat ada sebanyak 3 untuk melihat dampak dari instrumen fiskal yang diteliti dapat dieksplanasi lebih baik. Pembuatan 3 model tersebut didasari oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti (Nursini, 2017) yang membuat 2 model penelitian yaitu model 1, jenis belanja pemerintah yang secara implisit dibiayai oleh penerimaan pajak dan model 2, jenis belanja pemerintah yang dibiayai oleh hutang luar negeri. Pada penelitian ini, menggunakan 3 model, yaitu model pendapatan Negara, di mana variabel independennya berupa Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Inflasi, lalu model Pengeluaran Pemerintah, di mana variabel independennya hanya terdiri dari Pengeluaran Pemerintah, variabel independen tersebut merupakan gabungan dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Model Belanja Pemerintah Pusat, di mana variabel independennya merupakan Belanja modal pemerintah pusat Pusat, Belanja pegawai pemerintah pusat Pusat, dan Belanja barang pemerintah pusat Pusat. Model VECM digunakan dalam menjelaskan dampak perubahan satu variabel terhadap variabel lainnya di dalam penelitian ini jika terdapat satu atau lebih variabel tidak stasioner di arasnya atau di *level*-nya (I(0)). Agar model VECM sah digunakan, variabel-variabel di dalam modelnya perlu dipastikan berkointegrasi melalui uji kointegrasi.

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \Gamma \Delta Y_{t-i} + \Upsilon_1 ECT_{t-1} + e_t$$

Di mana ΔY_t dan ΔY_{t-i} merupakan vektor dari variabel-variabel Pertumbuhan Ekonomi (Gdp_riil), Pendapatan Negara Bukan Pajak (Non_Tax), Pendapatan Pajak (Tax_Inc), Pengeluaran Pemerintah (Gov_Exp), Belanja modal pemerintah pusat Pusat (Cap_Gov), Belanja pegawai pemerintah pusat Pusat (Emp_Exp), Belanja barang pemerintah pusat Pusat (Gov_Gds), dan Tingkat Inflasi (Inf_CG). dalam bentuk *first difference*, yaitu perbedaan nilai satu variabel di satu periode waktu dengan nilainya di satu periode sebelum atau sesudahnya. Penjelasan notasi lainnya adalah sebagai berikut:

- Δ : variabel dalam turunan *first difference*
- β : vektor konstanta
- Γ : vektor koefisien dinamis jangka pendek dari penyesuaian model jangka panjang
- Υ : parameter kecepatan penyesuaian (*speed of adjustment*)
- ECT_{t-1} : koreksi kesalahan dari persamaan yang berkointegrasi (*error correction terms*)
- n : jumlah panjang *lag*
- e_t : gangguan acak (*random disturbance terms*)

RESULT AND DISCUSSION

Result

Uji Stasioneritas

Tabel 1. Hasil Uji Stasioneritas

Variabel	Nilai Koefisien δ	P.Value		Metode	Perubahan Struktur
		I(0)	I(1)		
Gdp_ruil	-4.151	0.8994	< 0.01***	Phillips-Perron	-
Tax_Inc	-4.051	0.6026	< 0.01***	Phillips-Perron	-
Non_Tax	-5.980	0.7950	< 0.01***	Phillips-Perron	-
Cap_Gov	-7.382	0.5693	< 0.01***	Phillips-Perron	-
Emp_Exp	-4.167	0.3220	< 0.01***	Phillips-Perron	-
Gov_Exp	-5.683	0.3379	< 0.01***	Phillips-Perron	-
Gov_Gds	-7.820	0.4839	< 0.01***	Phillips-Perron	-
Inf_CG	-1.419	2.890	4.607	Clemente-Montañés- Reyes, AO	1 perubahan struktur: 1998
		(< 3.560)	(< 3.560)		

Signifikan pada tingkat ***1%.

Sumber : hasil pengolahan data

Tabel 1 menampilkan rangkuman hasil uji stasioneritas yang menggunakan metode uji Phillips-Perron dan Clemente-Montañés-Reyes yang mengakomodasi adanya Structural Break (SB) pada data. Metode uji Clemente-Montañés-Reyes digunakan karena variabel nilai pertumbuhan inflasi menunjukkan break struktur. Krisis moneter Asia—juga dikenal sebagai "krisis finansial Asia"—terjadi pada tahun 1998 karena devaluasi besar mata uang baht Thailand pada tahun 1997, yang juga melemahkan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Hasil uji stasioner menunjukkan bahwa semua variabel tidak stasioner di I(0) atau di level, tetapi stasioner pada bentuk I(1) atau perbedaan pertama. Hipotesis nol (H_0) uji stasioneritas dengan metode Phillips-Perron adalah ada akar unit atau tidak stasioner, sedangkan Hipotesis H_0 uji stasioneritas dengan metode Clemente-Montañés-Reyes adalah stasioner. Karena semua variabel baru stasioner pada I(1), model VECM harus diestimasi.

Penentuan Lag Optimum

Pada persamaan pendapatan, model akan menggunakan panjang lag 4 periode berdasarkan nilai kriteria LR, Final Prediction Error (FPE), AIC, dan HQIC yang terkecil. Namun, nilai kriteria SBIC lebih pendek dengan panjang lag 0 dan 1 periode, sehingga tidak dipilih untuk menghindari masalah otokorelasi. Pada persamaan pengeluaran negara, model akan menggunakan panjang lag 0 periode berdasarkan nilai kriteria LR, Final Prediction Error (FPE), AIC, HQIC, dan SBIC yang terkecil. Pada persamaan belanja pemerintah pusat, model akan menggunakan panjang lag 4 periode berdasarkan nilai kriteria LR, Final Prediction Error (FPE), AIC, dan HQIC yang terkecil,

Uji Kointegrasi Johansen

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa pada persamaan pendapatan negara dan belanja pemerintah pusat terdapat dua hubungan kointegrasi di antara variabel-variabel yang diamati. Ditunjukkan dengan nilai *Trace Statistics* lebih besar dari nilai *Critical Value* pada derajat signifikansi 5% pada rank 2 yang ditandai dengan tanda (*) pada rank 2, dimana setelah rank 2 nilai *Trace Statistics* terus menurun yang menunjukkan bahwa hanya terdapat dua kejadian kointegrasi pada model ini. Namun, pada persamaan pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa nilai *Trace Statistics* (8.0485) lebih kecil dari nilai kritis 5% (15.41) sehingga tidak dapat menolak hipotesis nol bahwa tidak ada hubungan kointegrasi (rank 0). Dengan demikian dapat disimpulkan model *Vector Error Correction Model* (VECM) menjadi model yang tepat digunakan dalam penelitian ini karena variabel-variabel di dalam modelnya berkointegrasi.

Uji Kausalitas

Uji kausalitas Granger digunakan untuk menentukan apakah mungkin untuk menggunakan satu variabel untuk meramalkan bagaimana perubahan pada satu variabel akan berdampak pada variabel lainnya. Terdapat dua hubungan kausalitas satu arah dalam penelitian ini, yakni pada persamaan pengeluaran pemerintah, perubahan pada Gdp riil berkorelasi satu arah dengan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya pada persamaan belanja pemerintah pusat, perubahan pada variabel belanja pegawai pemerintah pusat berkorelasi satu arah dengan belanja barang pemerintah pusat.

Hasil Estimasi VECM

Pada hasil jangka pendek persamaan pendapatan negara, hanya ada variabel $ce1$ yang signifikan dalam model dan bersifat negative. Pada persamaan jangka pendek pengeluaran pemerintah pada persamaan Gdp riil, hanya ada variabel $ce1$ yang signifikan dalam model dan bersifat negatif. Terakhir, pada hasil jangka pendek persamaan belanja pemerintah pusat, Gdp riil, variabel $ce1$ signifikan dan bersifat positif. Lalu, pada variabel Gdp riil berpengaruh secara negatif dan signifikan di lag 2 dengan koefisien sebesar -0,6%. a.

- a. Keseimbangan jangka panjang persamaan pendapatan

$$\Delta Gdp_{riil} = 1 - 0.4509974 Tax_{Inc_{t-1}} + 0.7382122 Non_Tax_{t-1} + 0.4364681 D_Inf_CG_{t-1} + 8.342438 cons + \mu 1t \quad (4.1)$$

- b. Keseimbangan jangka panjang pengeluaran pemerintah

$$\Delta Gdp_{riil} = 1 + 0.3285667 Gov_Exp_{t-1} + 6.723304 cons + \mu 1t \quad (4.2)$$

- c. Keseimbangan jangka panjang belanja pemerintah pusat

$$\Delta Gdp_{riil} = 1 + 2.048103 Cap_Gov_{t-1} - 19.72378 Emp_Exp_{t-1} + 14.88672 Gov_Gds_{t-1} + 52.27591 cons + \mu 1t \quad (4.3)$$

Pada persamaan pendapatan, variabel Gdp riil dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh pendapatan pajak di jangka panjang sebesar 0,45%, selanjutnya variabel pendapatan negara bukan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,78%, serta variabel pertumbuhan inflasi berpengaruh positif dan signifikan di jangka panjang terhadap Gdp riil sebesar 0,43%. Pada persamaan pengeluaran pemerintah, variabel Gdp riil dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengeluaran pemerintah di jangka panjang dengan koefisien sebesar 0,33%. Pada persamaan belanja pemerintah pusat, variabel Gdp riil dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel belanja modal pemerintah pusat sebesar 2,05%. Selanjutnya adalah variabel belanja pegawai pemerintah pusat yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Gdp riil dengan koefisien sebesar 19,72%. Variabel belanja barang pemerintah pusat berpengaruh secara positif dan signifikan di jangka panjang terhadap Gdp riil sebesar 14,89%.

Impulse Response Function (IRF)

Respons pendapatan pajak pemerintah terhadap guncangan Gdp riil bersifat negatif dan stagnan dalam lima tahun ke depan. Guncangan satu standar deviasi pada Gdp riil menyebabkan penurunan pendapatan pajak yang kecil. Respons negatif dimulai pada -1,5% di periode pertama, penurunan terbesar sebesar -3,9% di periode kedua, dan tetap di -2,5% hingga periode terakhir. Respons pendapatan bukan pajak terhadap guncangan Gdp riil bersifat negatif dan stagnan dalam lima tahun ke depan. Guncangan satu standar deviasi pada Gdp riil menyebabkan penurunan pendapatan pajak yang kecil. Respons negatif dimulai pada -1,3% di periode pertama, lalu penurunan terbesar sebesar -5,3% di periode kedua, dan tetap di -3,3% hingga periode terakhir. Respons pertumbuhan inflasi terhadap guncangan Gdp riil bersifat cukup fluktuatif dalam lima tahun ke depan. Guncangan satu standar deviasi pada Gdp riil menyebabkan baik peningkatan maupun penurunan pada pertumbuhan inflasi. Respons positif dimulai pada periode pertama sebesar 25,6%. Lalu terjadi penurunan pada periode kedua sebesar -32,7% serta menjadikan penuruna terbesar. Setealahnya pengaruhnya kembali bersifat positif untuk periode ke 3 dan ke 4, dengan koefisien periode ke 4 sebesar 54,9%

sekaligus menjadikan peningkatan tertinggi. Setelahnya pengaruh guncangan Gdp riil kembali bersifat negatif pada periode terakhir.

Respons pengeluaran pemerintah terhadap guncangan Gdp riil bersifat positif dan stagnan dalam lima tahun ke depan. Guncangan satu standar deviasi pada Gdp riil menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Respons positif dimulai pada 2,6% di periode pertama sekaligus menjadikannya sebesar penurunan terbesar, lalu kembali terjadi peningkatan pada periode ke 4 dengan koefisien sebesar 1,24% selanjutnya arah pengaruh guncangan Gdp riil terus bersifat positif hingga periode terakhir. Respons belanja modal pemerintah pusat terhadap guncangan Gdp riil bersifat cukup fluktuatif dalam lima tahun ke depan. Respons negatif dimulai pada periode pertama sebesar -6,4%. Lalu pada periode kedua sebesar -7,1% serta menjadikan penuruna terbesar. Setelahnya pengaruhnya kembali bersifat positif untuk periode ke 3 dan ke 4, dengan koefisien periode ke 3 sebesar 3,2% sekaligus menjadikan peningkatan tertinggi. Setelahnya pengaruh guncangan Gdp riil kembali bersifat negatif pada periode terakhir.

Respons belanja pegawai pemerintah pusat terhadap guncangan Gdp riil bersifat negatif dalam lima tahun ke depan. Respons negatif dimulai pada periode pertama sebesar -4,5, setelahnya terus menurun hingga periode ketiga -7,9% yang menjadikannya penurunan terbesar. Setelahnya arah pengaruh guncangannya masih bersifat negatif hingga periode terakhir. Respons belanja barang pemerintah pusat terhadap guncangan Gdp riil bersifat negatif dalam lima tahun ke depan. Respons negatif dimulai pada -4,3%, setelahnya terus menurun hingga periode keempat sebesar -10,2% yang menjadikannya penurunan terbesar. Setelahnya arah pengaruh guncangannya masih bersifat negatif hingga periode terakhir

Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

Shock dari Gdp riil menyebabkan peningkatan pada pendapatan pajak yang dampaknya dimulai pada periode pertama hingga periode kelima dengan nilai rata-rata sebesar 11,42%, nilai tertinggi terjadi pada periode keempat sebesar 23,75%. Shock dari Gdp riil menyebabkan peningkatan pada pendapatan bukan pajak yang dampaknya dimulai pada periode pertama hingga periode kelima dengan nilai rata-rata sebesar 5,54%, nilai tertinggi terjadi pada periode keempat sebesar 9,86%. Shock dari Gdp riil menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan inflasi yang dampaknya dimulai pada periode pertama hingga periode kelima dengan nilai rata-rata sebesar 44,96%, nilai tertinggi terjadi pada periode keempat sebesar 66,06%. Shock dari Gdp riil menyebabkan peningkatan pada pengeluaran pemerintah yang dampaknya dimulai pada periode pertama hingga periode kelima dengan nilai rata-rata sebesar 13,53%, nilai tertinggi terjadi pada periode keempat sebesar 21,22%.

Shock dari Gdp riil menyebabkan peningkatan pada belanja modal pemerintah pusat pusat yang dampaknya dimulai pada periode pertama hingga periode kelima dengan nilai rata-rata sebesar 40,12%, nilai tertinggi terjadi pada periode keempat sebesar 53,05%. Shock dari Gdp riil menyebabkan peningkatan pada belanja pegawai pemerintah pusat pusat yang dampaknya dimulai pada periode pertama hingga periode kelima dengan nilai rata-rata sebesar 71,61%, nilai tertinggi terjadi pada periode keempat sebesar 84,09%. Shock dari Gdp riil menyebabkan peningkatan pada belanja barang pemerintah pusat yang dampaknya dimulai pada periode pertama hingga periode kelima dengan nilai rata-rata sebesar 56,66%, nilai tertinggi terjadi pada periode keempat sebesar 79,00%.

Discussion

Analisis menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, tidak ada variabel yang signifikan pada persamaan Gdp riil. Di persamaan pendapatan pajak, Gdp riil berpengaruh negatif signifikan pada lag pertama dan positif pada lag kedua. Pendapatan pajak berpengaruh negatif signifikan pada lag kedua, sedangkan pendapatan negara bukan pajak berpengaruh negatif signifikan pada lag ketiga. Pada persamaan inflasi, Gdp riil berpengaruh negatif signifikan pada lag pertama. Pada persamaan pengeluaran pemerintah, Gdp riil berpengaruh negatif signifikan pada lag pertama, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif pada lag kedua. Dalam persamaan belanja pemerintah pusat, Gdp riil berpengaruh negatif signifikan pada lag kedua dan positif pada lag ketiga. Belanja pegawai

berpengaruh positif signifikan, sedangkan Gdp riil berpengaruh negatif pada lag pertama dan kedua. Dalam persamaan belanja barang, Gdp riil berpengaruh negatif signifikan pada lag pertama dan ketiga. Dalam jangka panjang, Gdp riil dipengaruhi negatif signifikan oleh pendapatan pajak, yang berdampak pada investasi dan daya beli konsumen. Misalnya, peningkatan tarif pajak pada tahun 1990-2000 mengurangi investasi. Pendapatan negara bukan pajak berpengaruh positif signifikan, didorong oleh kontribusi dividen BUMN seperti PT Pertamina pada tahun 2023. Inflasi berpengaruh positif signifikan, sesuai dengan penelitian yang menunjukkan tingkat inflasi tertentu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap Gdp riil, sejalan dengan teori Keynesian. Belanja modal dan barang pemerintah pusat juga berpengaruh positif signifikan terhadap Gdp riil, sedangkan belanja pegawai berpengaruh negatif signifikan. Hasil IRF menunjukkan bahwa pendapatan pajak dan negara bukan pajak merespons negatif terhadap guncangan Gdp riil dalam lima tahun ke depan. Pengeluaran pemerintah dan belanja modal menunjukkan respons positif. Hasil FEVD menunjukkan bahwa guncangan Gdp riil memberikan dampak signifikan pada berbagai kategori dalam lima tahun ke depan, dengan pengeluaran pemerintah dan belanja pegawai pusat mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil ini mendukung pentingnya kebijakan fiskal yang tepat dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.

CONCLUSION

Penelitian ini menemukan bahwa dalam jangka pendek, berbagai variabel pada persamaan pendapatan, pajak, dan belanja pemerintah menunjukkan pengaruh yang signifikan namun bervariasi terhadap Gdp riil. Di jangka panjang, pendapatan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Gdp riil, sementara pendapatan negara bukan pajak dan inflasi menunjukkan pengaruh positif signifikan. Pengeluaran pemerintah juga berdampak positif terhadap Gdp riil, sesuai dengan teori Keynesian yang menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam merangsang pertumbuhan ekonomi melalui proyek infrastruktur dan belanja sosial.

Belanja modal dan belanja barang pemerintah pusat meningkatkan Gdp riil, sedangkan belanja pegawai memiliki dampak negatif. Hasil dari Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) menunjukkan bahwa guncangan Gdp riil berdampak signifikan pada pendapatan dan pengeluaran pemerintah selama lima tahun ke depan, dengan respons yang bervariasi di berbagai periode. Keseluruhan analisis ini menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan temuan dari penelitian sebelumnya.

Acknowledgment

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan saya untuk menyelesaikan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia." Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan Espritzen atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan selama penelitian ini. Bantuan dan dorongan kalian sangat berarti dalam proses penyelesaian karya ini.

REFERENCES

- Brooks, C. (2019). *Introductory Econometrics for Finance, FOURTH EDITION*. Dalam *Introductory Econometrics for Finance, Fourth Edition* (Vol. 4th).
- Enders, W. (2014). *Applied Econometric Time Series* (4th Edition). Wiley.
- Gregory, M. (2019). N. Gregory Mankiw - *Macroeconomics* (2019, Macmillan Higher Education) - libgen.lc. *Macroeconomics*
- Nursini, N. (2017a). International Journal of Economics and Financial Issues Effect of Fiscal Policy and Trade Openness on Economic Growth in Indonesia: 1990-2015. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 358–364. <http://www.econjournals.com>
- Rosevear, S. (n.d.). *q-r-ù-Economic Rationalistrt-The Key to National Competitive Advanta BE, Restructuritg and Employment Growth? Lessons Drawn from the Policies Advocated and Implemented Under the Hawke and Keating Governments of L983 to 1996.*